



## **Systematic Literature Review: Analisis Tren dan Tantangan Dalam Perkembangan Desentralisasi di Indonesia**

**Rizki Afri Mulia<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Imam Bonjol, Padang, Indonesia

\*penulis korespondensi: rizkiafrimulia87@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

#### *Article history:*

Received 11 October 2022

Received in revised form 22 September 2022

Accepted 15 Desember 2022

### **ABSTRACT**

Selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai politik, otonomi daerah dan desentralisasi banyak dibicarakan di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara yang tidak akan pernah selesai dan niscaya akan terus mengalami modifikasi dan tidak akan pernah selesai. Mengetahui tren metode yang digunakan dalam artikel ilmiah juga menjadi pembahasan yang menarik. Tentunya dari sekian banyak penelitian yang dilakukan dapat dipastikan ada berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam pengerjaannya. Terkadang dalam penelitian juga menyisakan pertanyaan yang masih belum terjawab. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tren dari topik dan tantangan serta mengumpulkan *open question* yang belum terjawab pada penelitian desentralisasi pada tahun 2017-2022. Analisis tren ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode *systematic literature review* dengan menggunakan Google Scholar sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan tren topik penelitian desentralisasi adalah “kebijakan, politik daerah dan pembangunan daerah”. Topik ini memiliki persentase masing-masing pembahasan tertinggi sebesar 19,2% dan 15,4%. Sedangkan topik penelitian paling rendah adalah “pariwisata, politik budaya, politik hukum, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya manusia” dengan persentase masing-masing sebesar 3,8%. Tren penggunaan metode dalam penelitian bidang desentralisasi adalah penggunaan metode “Kualitatif”. Metode ini memiliki penggunaan terbanyak dengan persentase sebesar 92,3%. Sedangkan tren penggunaan paling rendah adalah “kuantitatif” dengan persentase 7,7%. Tantangan yang dihadapi dalam kajian desentralisasi diantaranya adalah konflik vertikal, Lembaga reformasi dan ketidaksetaraan akses yang sebagian karena geografinya sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

#### *Keyword:*

*Systematic Literature Review,  
Tren, Metode, Tantangan,  
Desentralisasi*

## PENDAHULUAN

Selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai politik, otonomi daerah dan desentralisasi banyak dibicarakan di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara yang tidak akan pernah selesai dan niscaya akan terus mengalami modifikasi dan tidak akan pernah selesai. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kita mengenal gagasan pokok pemerintahan daerah: Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi. Terkait pemerintahan daerah, delapan (8) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini saat ini berlaku terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya delapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 1945 hingga saat ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami penyesuaian dan perkembangan yang sangat dinamis sejak kemerdekaan. Evolusi penyelenggaraan negara Indonesia dan otonomi yang diberikan kepada daerah mengalami pasang surut. Awalnya, "otonomi yang tulus dan bertanggung jawab" digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. (Thamrin, 2019). Desentralisasi menjadi lawan dari program pemerintah sentralisasi pemerintah pusat yang hegemonik. (Bida, 2021).

Kesenjangan yang ada dalam memahami metode penelitian yang digunakan dalam studi desentralisasi adalah fenomena saat ini. Kebanyakan peneliti menyukai metode penelitian kualitatif untuk desentralisasi, tetapi beberapa menyukai metode penelitian

kuantitatif. Tidak ada penelitian dalam desentralisasi yang menganalisis tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian otonomi daerah. Oleh karena itu, penulis didorong untuk mengatasi kurangnya pengetahuan mengenai tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian di bidang ilmu desentralisasi. Tujuan utama studi ini adalah untuk menyelidiki tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian bidang ilmu desentralisasi. Penelitian yang membahas bidang ilmu desentralisasi telah menggunakan berbagai metodologi. Dengan banyaknya penelitian yang dilakukan, setiap penelitian pasti memiliki tantangan. Rintangan ini harus diidentifikasi untuk memajukan penelitian di masa depan. Untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut diperlukan adanya penelitian dengan menggunakan metode *systematic literature review*.

Pendekatan tinjauan literatur sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis temuan pada masalah penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Awalnya, pendekatan SLR sering digunakan dalam penelitian farmasi dan medis. Namun, pada tahun 2007, Barbara Kitchenham mulai menerapkan strategi ini pada industri komputasi. Strategi ini cocok untuk menganalisis pola penelitian dalam kerangka waktu tertentu. Proses penelitian ini berfokus pada pernyataan penelitian berikut: (1) Bagaimana tren penelitian yang terjadi pada bidang ilmu desentralisasi dari tahun 2017-2022?; (2) Apa saja metode yang digunakan dalam penelitian bidang ilmu desentralisasi dalam tahun 2017-2022?; (3) Apa saja tantangan dalam penelitian bidang ilmu desentralisasi dalam tahun 2017-2022?

## METODE PENELITIAN

Tinjauan sistematis dan meta-analisis bertujuan untuk mengidentifikasi

tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian bidang ilmu desentralisasi dengan memeriksa dan menganalisis artikel yang dilakukan antara 2017 dan 2022. Tinjauan sistematis literatur ini dilakukan dengan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) (Liberati et al., 2009)

### Strategi pencarian dan kriteria inklusi

Untuk melakukan pencarian mendalam tentang bidang ilmu desentralisasi, peneliti menggunakan *database* dari Google Scholar dengan kata kunci “perbandingan bentuk pemerintahan, desentralisasi, tantangan” yang dibantu dengan aplikasi *Publish or Perish* dari tahun 2017-2022 sebanyak 200 artikel.

### Uji Coba Proses Seleksi Studi

Setiap *database* berisi direktori berbeda untuk konten yang relevan. Dikecualikan diterbitkan disertasi, buku, abstrak konferensi, dan ulasan. Selain itu, penelitian duplikat dihilangkan. Judul dan abstrak artikel yang terkumpul kemudian dinilai secara independen oleh tiga peneliti berdasarkan kriteria inklusi. Studi yang tidak tersedia dalam teks lengkap diperoleh melalui korespondensi dengan penulis dan dihilangkan karena kurangnya akses ke teks lengkap/tidak ada tanggapan dari penulis. Teks lengkap kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi.

### Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Dengan niat untuk memilih dan memasukkan hanya studi yang relevan untuk topik penelitian kami yang diidentifikasi dari *database*, kriteria inklusi dan eksklusi spesifik ditentukan.

#### Kriteria Inklusi

- IC1 : Artikel jurnal
- IC2 : Studi yang ditulis dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

- IC3 : Studi ini ditinjau oleh rekan sejawat.
- IC4 : Studi tidak terdaftar di *database* lain
- IC5 : Penelitian dilakukan di bidang Desentralisasi
- IC6 : Artikel ter indeks jurnal nasional terakreditasi
- IC7 : Artikel tersedia dengan teks lengkap

#### Kriteria Eksklusi

- IC1 : Prosiding kongres, makalah konferensi, buku, bab buku, dan publikasi *non-peer-review* lainnya.
- IC2 : Studi yang ditulis tidak dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- IC3 : Studi ini tidak ditinjau oleh rekan sejawat.
- IC4 : Studi terdaftar di *database* lain
- IC5 : Penelitian tidak dilakukan di bidang Desentralisasi
- IC6 : Artikel tidak ter indeks jurnal nasional terakreditasi
- IC7 : Artikel tidak tersedia dengan teks lengkap

Kriteria penelitian ini meliputi publikasi tentang tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian desentralisasi. Setelah menentukan istilah pencarian dan menentukan kriteria inklusi, kami melakukan pencarian komprehensif selama 2017–2022 untuk menemukan artikel berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang relevan. Keputusan untuk memasukkan artikel yang diterbitkan setelah 2017 didasarkan pada fakta bahwa ini adalah masa ketika tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian desentralisasi diperdebatkan dengan hangat.

#### Penilaian Kualitas Studi

Peringkat kualitas skala Newcastle-Ottawa yang dimodifikasi digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian desain

studi, teknik perekrutan, tingkat respons, keterwakilan sampel, objektivitas/keandalan penentuan hasil, perhitungan daya yang tersedia, dan analisis statistik. (Modesti et al., 2016; Pahlevan-Sharif et al., 2019). Ketidaksepakatan skor diselesaikan dengan konsensus, dan peringkat akhir diberikan untuk setiap studi.

### Ekstraksi dan analisis data

#### Ekstraksi Data

Peninjau secara independen memeriksa teks lengkap dari 200 kutipan yang dianggap "mungkin relevan". Rincian

penting berikut diekstraksi: penulis, tahun, metode penelitian, tujuan penelitian, dan kesimpulan umum. Setelah memilih 26 artikel pendahuluan (Tabel 1), kami menggunakan asisten peneliti yang dibantu dengan triangulasi data, pengkodean artikel, dan mengidentifikasi pola berulang di antara publikasi. Kami membuat tabel yang berisi fakta yang relevan untuk setiap artikel dan kemudian mengategorikan informasi ini ke dalam tema. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi "*grounded theory*".

**Tabel 1. Deskripsi studi yang ditinjau**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode	Topik	Akreditasi
1.	Abdul Kadir Jaelani (2018)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kualitatif	Pariwisata	Sinta 4
2.	Abdul Rahman, Evi Satispi dan Dwiky Lucky Adiyasha (2020)	Perbandingan <i>E-Government</i> Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi	Kualitatif	<i>E-Government</i>	Sinta 4
3.	Andhika Lungguh Perceka (2018)	Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut	Kuantitatif	Kebijakan	Sinta 4
4.	Andi Candra Jaya (2019)	Politik Budaya Melayu: Strategi Kebudayaan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Menghadapi Tantangan Global	Kualitatif	Politik Budaya	Sinta 4
5.	Aullia Vivi Yulianingrum (2022)	Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya)	Kualitatif	Kebijakan	Sinta 4
6.	Azlan Thamrin (2019)	Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan	Kualitatif	Politik Hukum	Sinta 4
7.	Chairun Nisa Zempi, Siti Maryam dan Priyono (2022)	<i>E-Government</i> Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi di Indonesia: Implikasi Sosial dan Politik	Kualitatif	<i>E-Government</i>	Sinta 5

8.	Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. (2018)	Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia	Kualitatif	Pemberdayaan Masyarakat	Sinta 2
9.	Denok Sunarsi (2018)	Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategik & Karakteristik Sistem Pendukungnya : Sebuah Tinjauan	Kualitatif	Manajemen Sumber Daya Manusia	Sinta 4
10.	M. Fadhillah Harnawansyah (2019)	Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah	Kualitatif	Politik Daerah	Sinta 4
11.	Heppy Purbasari (2017)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Desentralisasi Fiskal	Sinta 2
12.	Johansyah (2018)	Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi	Kualitatif	Politik Daerah	Sinta 5
13.	Joko Tri Haryanto (2017)	Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal	Kualitatif	Desentralisasi Fiskal	Sinta 2
14.	Kafrawi, H. Abdul Khair, M. Saleh dan Sarkawi (2018)	Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora)	Kualitatif	Pendapatan Daerah	Sinta 5
15.	Lesmana Rian Andhika (2017)	Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: <i>Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government</i>	Kualitatif	Tata Kelola	Sinta 2
16.	Mexsasai Indra (2021)	Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara	Kualitatif	Desentralisasi Asimetris	Sinta 5
17.	Ni'matul Huda dan Despan Heryansyah (2019)	Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kualitatif	Kebijakan	Sinta 2
18.	Noer Fauzi Rachman (2018)	Meninjau Kembali Teorisasi Mengenai Desentralisasi, <i>Community Driven Development</i> , Dan Kapitalisasi Agraria	Kualitatif	Pembangunan Daerah	Sinta 2
19.	Obed Bida (2021)	Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan	Kualitatif	Kebijakan	Sinta 4

		Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara			
20.	Ramlani Lina Sinaulan (2018)	Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan	Kualitatif	Kebijakan	Sinta 4
21.	Rangga Saptia Mohamad Permana dan Jimi Narotama Mahameruaji (2020)	Perbandingan Konsep-konsep <i>Triumvirate</i> Sunda dengan Trias <i>Politica</i> dalam Perspektif Komunikasi Politik	Kualitatif	Komunikasi Politik	Sinta 2
22.	Ratnia Solihah (2018)	Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik	Kualitatif	Politik Daerah	Sinta 3
23.	Rira Nuradhawati (2019)	Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia	Kualitatif	Politik Daerah	Sinta 3
24.	Sherlock Halmes Lekipiouw (2020)	Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan	Kualitatif	Pembangunan Daerah	Sinta 2
25.	Zainal Fadri (2020)	Pembangunan Masyarakat Alternatif Model <i>Democratic Participatory</i>	Kualitatif	Pembangunan Daerah	Sinta 4
26.	Zumrotin Azizatul Noor, Tiara Dewi Sekarningrum dan Tri Sulistyaningsih (2021)	Disparitas perkotaan pedesaan: pemerataan dalam akses layanan kesehatan primer untuk lansia selama pandemi Covid-19	Kualitatif	Pembangunan Daerah	Sinta 2

### Analisis Data

Strategi '*grounded theory*' mengkaji data yang diperoleh dari literatur untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan mungkin kesimpulan tema. Kami awalnya mempelajari literatur tanpa *coding* dan menyusun pertanyaan studi. *Grounded theory* menggunakan prosedur yang intens, terbuka, dan interaktif yang menggabungkan pengumpulan data, pengkodean (analisis data), dan penulisan memo secara bersamaan (*theory building*) (Gómez-Leal et al., 2022; Groat & Wang, 2004).

Kami memulai penelitian dengan menanyakan apa yang sudah kami ketahui atau amati tentang tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian desentralisasi. Pemilihan literatur mengikuti kriteria Prisma. Kami melakukan tinjauan literatur dan memulai pengambilan sampel teoretis. Ketiga

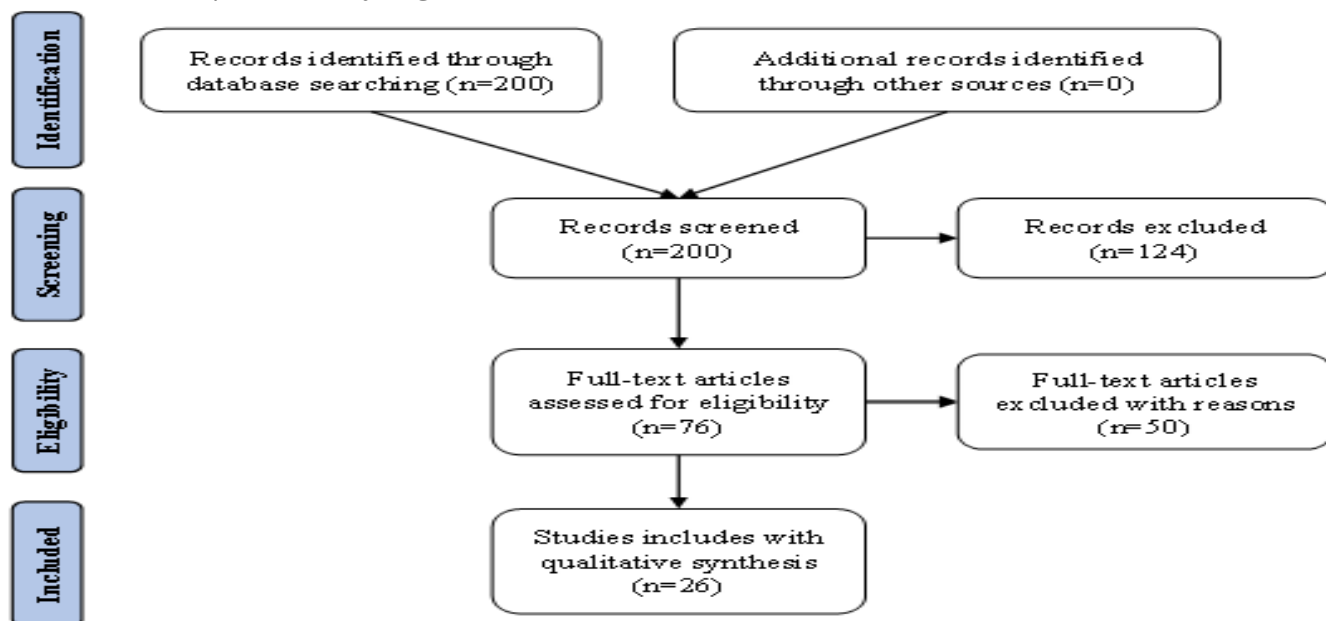
peneliti secara independen mengkodekan data dan menyepakati kategori literatur. Menggunakan induksi analitik, kami memeriksa data dan mengidentifikasi tren berulang di beberapa penelitian.

Tujuan dari makalah ini bukan untuk mendalilkan teori tetapi untuk menyajikan dan mensintesis tubuh literatur yang menyatukan tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian desentralisasi. Tujuannya adalah untuk belajar tentang konsep-konsep yang muncul dalam topik ini dari literatur. Membandingkan dan mengontraskan literatur melalui lensa kualitatif memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tema-tema umum yang menjelaskan gagasan ini. Jika para peneliti memperluas penelitian ini, mungkin kita dapat merumuskan teori terpadu.

Hasil pencarian dan penyaringan

Kami mengidentifikasi total 200 referensi dari *database* Google Scholar. Setelah menghapus duplikat, ini menghasilkan penelitian. Dari 76 studi ini, hanya 26 yang dipilih untuk meninjau teks lengkap, dengan mempertimbangkan kriteria inklusi/eksklusi yang ditentukan

serta 26 studi akhirnya dimasukkan. Ketidaksepakatan diselesaikan dengan konsensus. Proses pencarian dan pemilihan item dilakukan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh PRISMA dan ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1. PRISMA 2022 flow diagram**

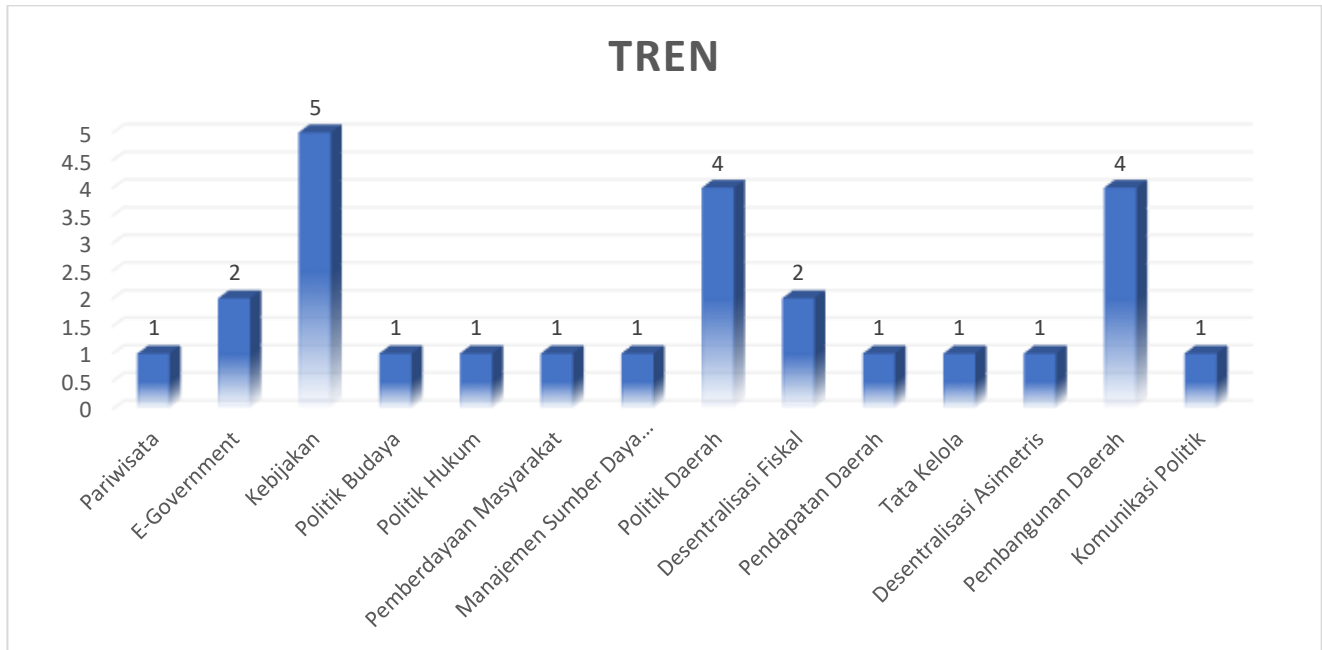
**Sumber: Page et al., (2021)**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Tren penelitian yang terjadi pada bidang kajian desentralisasi publik dari tahun 2017-2022**

Dalam tinjauan sistematis ini, 26 jurnal menganalisis tentang tren dalam penelitian desentralisasi. Setiap tahun

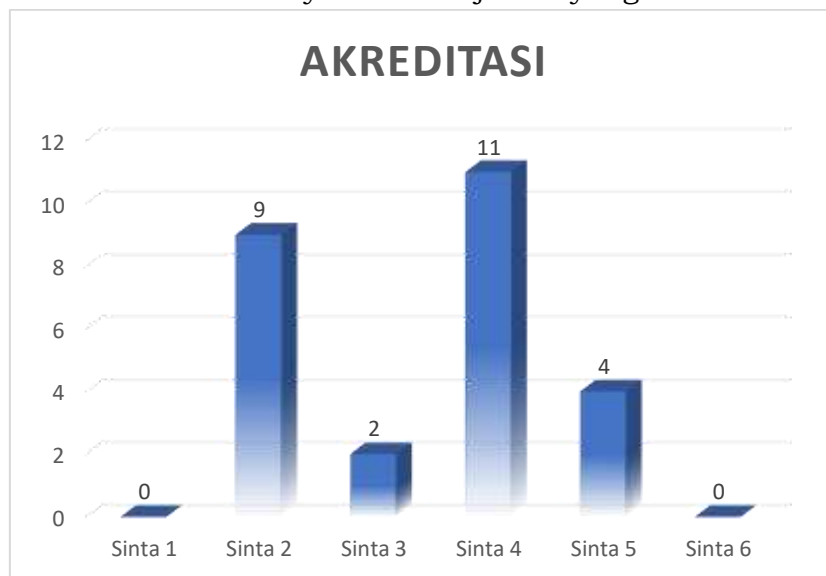
Setiap tahun terdapat jurnal yang membahas tentang tren penelitian desentralisasi. dalam kurun waktu 2017-2022, tren penelitian dalam desentralisasi lebih didominasi dengan topik kebijakan politik daerah dan pembangunan daerah. Gambar 4 juga menunjukkan tren penelitian tentang.



**Gambar 5. Tren Penelitian Ilmu Desentralisasi tahun 2017-2022**

Selanjutnya, dari 26 penelitian yang dianalisis terbagi ke dalam beberapa jurnal yang terakreditasi nasional yaitu

penelitian yang didominasi dari jurnal terakreditasi Sinta 4 dan disusul oleh jurnal yang terakreditasi Sinta 4.

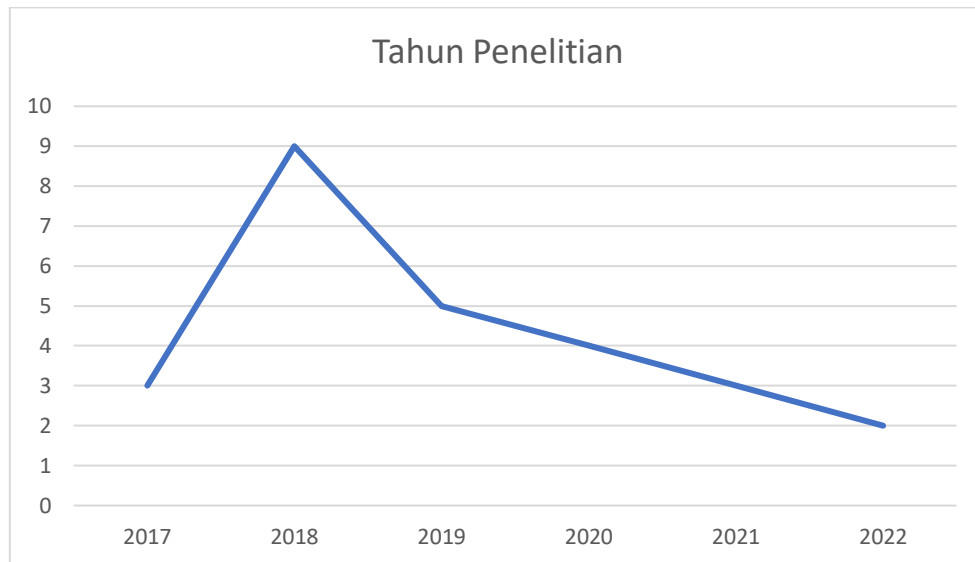


**Gambar 6. Tren Akreditasi Jurnal Penelitian Ilmu Desentralisasi tahun 2017-2022**

Selanjutnya, dari 26 penelitian yang dianalisis didapat tren tahun penelitian paling dominan yaitu pada tahun 2018

sebanyak 9 penelitian dan disusul pada tahun 2019 sebanyak 5 penelitian.





**Gambar 7. Tren Penelitian Berdasarkan Tahun Penelitian**

#### **Metode yang digunakan dalam kajian desentralisasi dalam tahun 2017-2022**

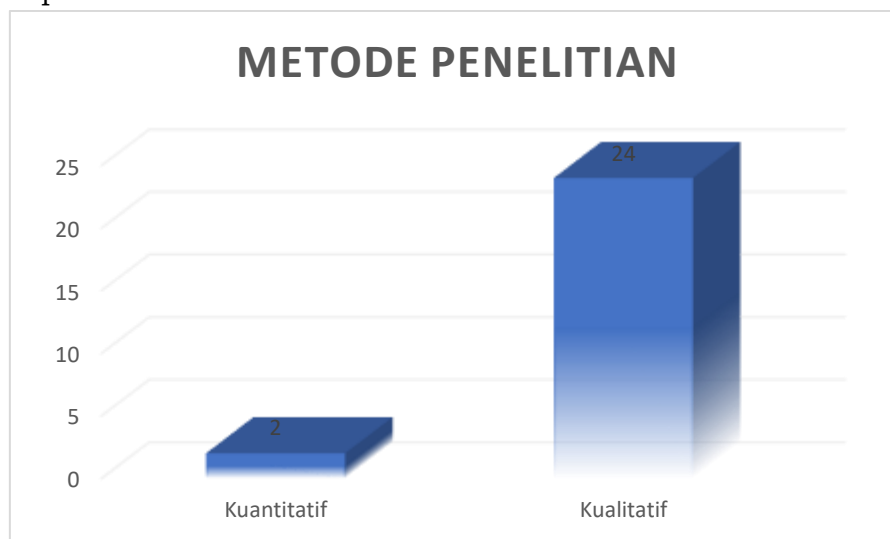
Berdasarkan tinjauan sistematis ini dari 26 artikel yang dianalisis ditemukan bahwa metode penelitian didominasi oleh metode penelitian kualitatif yang berjumlah 24 artikel dan disusul 2 artikel dengan metode kuantitatif. Pemilihan metode penelitian kualitatif pada desentralisasi sudah sangat menjamur di berbagai publikasi. Metode kualitatif dapat digunakan dalam kajian desentralisasi untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjek terhadap perubahan kebijakan desentralisasi. Berikut ini adalah beberapa metode kualitatif yang dapat digunakan dalam kajian desentralisasi: 1) Wawancara: Wawancara dapat dilakukan dengan para pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk memahami pandangan mereka tentang kebijakan desentralisasi dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan mereka. 2) Pengamatan: Pengamatan langsung dapat dilakukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan

kebijakan desentralisasi terjadi di lapangan. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara melihat kegiatan di daerah, seperti rapat pemerintah daerah atau acara yang melibatkan masyarakat. 3) Studi kasus: Studi kasus dapat dilakukan untuk memahami dampak kebijakan desentralisasi pada daerah tertentu. Contohnya, studi kasus dapat dilakukan pada daerah yang menerapkan kebijakan desentralisasi dengan sukses atau pada daerah yang mengalami masalah dalam implementasi kebijakan tersebut. 4) Fokus kelompok: Fokus kelompok dapat dilakukan untuk memahami pandangan kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijakan desentralisasi. Kelompok-kelompok ini dapat meliputi kelompok masyarakat, kelompok pekerja, atau kelompok yang terlibat dalam kebijakan desentralisasi.

Dalam kajian desentralisasi, metode kualitatif dapat membantu peneliti untuk memahami aspek-aspek kualitatif dari kebijakan desentralisasi, seperti persepsi dan pengalaman subjek terhadap kebijakan tersebut. Namun, metode ini

memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi dan representativitas, sehingga perlu dipadukan dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Peran metode

kuantitatif juga memiliki peran penting dalam ilmu desentralisasi karena metode kuantitatif memiliki fungsi sebagai penguji konsep yang dihadirkan oleh metode kualitatif.



**Gambar 6. Metode Penelitian Desentralisasi tahun 2017-2022**

#### **Tantangan dalam penelitian kajian desentralisasi dalam tahun 2017-2022**

Dalam penelitian tentang desentralisasi, tentunya para peneliti menemui berbagai macam tantangan. Meski tatanan telah berubah, pokok pembicaraan ini, konflik vertikal, menunjukkan resistensi daerah yang semakin meningkat terhadap otoritas pemerintah pusat (Huda & Heryansyah, 2019). Selain itu, tantangan bagi masyarakat Indonesia adalah membenahi kelembagaan yang sudah ada, bukan mendirikan yang baru. Agenda utamanya adalah mendemokratisasi lembaga-lembaga negara sehingga warga negara dapat memiliki kepercayaan terhadapnya (Rachman, 2018). Ketimpangan akses akan tetap menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan layanan kesehatan Indonesia selama beberapa dekade. Hal ini antara lain disebabkan oleh topografi negara sebagai negara kepulauan, serta keragaman infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah di seluruh daerah, khususnya pada era desentralisasi (Noor et al., 2021).

Desentralisasi memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta meningkatkan ketersediaan layanan publik yang lebih baik. Namun, implementasi kebijakan desentralisasi tidak selalu mudah dan sering kali dihadapkan pada beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan dalam perkembangan desentralisasi:

1. Kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia: Implementasi kebijakan desentralisasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang cukup. Namun, sering kali terdapat keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia, seperti kurangnya pengalaman, pendidikan, dan pelatihan.
2. Ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat: Pemerintah daerah sering kali bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan dan program. Hal ini dapat

menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan membatasi kemampuan daerah untuk mengambil keputusan yang mandiri dan menciptakan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

3. Konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat: Implementasi kebijakan desentralisasi dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah daerah mengambil keputusan yang tidak konsisten dengan kepentingan masyarakat atau ketika masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat: Implementasi kebijakan desentralisasi membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Namun, sering kali terdapat kesulitan dalam hal koordinasi ini, seperti perbedaan pandangan, kebijakan, dan pendekatan.
5. Kendala hukum dan regulasi: Implementasi kebijakan desentralisasi dapat dihadapkan pada kendala hukum dan regulasi yang rumit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hal yurisdiksi dan kewenangan, serta menghambat pelaksanaan kebijakan desentralisasi.
6. Ketimpangan antara daerah yang maju dan tertinggal: Implementasi kebijakan desentralisasi dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara daerah yang maju dan tertinggal. Hal ini dapat terjadi ketika daerah yang sudah maju mendapatkan keuntungan lebih besar dari desentralisasi daripada daerah yang masih tertinggal, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan antara daerah.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, serta memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tren topik penelitian yang terjadi pada desentralisasi di tahun 2017-2022 adalah pembahasan topik “kebijakan, politik daerah dan pembangunan daerah”. Topik ini memiliki persentase masing-masing pembahasan tertinggi sebesar 19,2% dan 15,4%. Sedangkan topik penelitian paling rendah adalah “pariwisata, politik budaya, politik hukum, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya manusia” dengan persentase masing-masing sebesar 3,8%. Tren penggunaan metode dalam penelitian bidang desentralisasi adalah penggunaan metode “Kualitatif”. Metode ini memiliki penggunaan terbanyak dengan persentase sebesar 92,3%. Sedangkan tren penggunaan paling rendah adalah “kuantitatif” dengan persentase 7,7%.
2. Tantangan yang dihadapi dalam kajian desentralisasi diantaranya adalah konflik vertikal, Lembaga reformasi dan ketidaksetaraan akses yang sebagian karena geografinya sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open

- government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248.
- Fadri, Z. (2020). Pembangunan Masyarakat Alternatif Model Democratic Participatory. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(2), 27–39.
- Gómez-Leal, R., Holzer, A. A., Bradley, C., Fernández-Berrocal, P., & Patti, J. (2022). The relationship between emotional intelligence and leadership in school leaders: a systematic review. *Cambridge Journal of Education*, 52(1), 1–21.
- Groat, L., & Wang, D. (2004). Architectural research methods. *Nexus Network Journal*, 6(1), 51–53.
- Harnawansyah, M. F. (2019). Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 50–64.
- Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 103–116.
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 238–258.
- Indra, M. (2021). GAGASAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU SEBAGAI POROS MARITIM DAN MENJAGA KEDAULATAN NEGARA. *Riau Law Journal*, 5(2), 141–160.
- Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(1), 56–67.
- Jaya, A. C. (2019). POLITIK BUDAYA MELAYU: STRATEGI KEBUDAYAAN MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 68–84.
- Johansyah, J. (2018). PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SISTEM OTONOMI. *Solusi*, 16(3), 283–292.
- Khair, H. A., Saleh, M., & Sarkawi, S. (2018). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora). *Jatiswara*, 33(3), 293–305.
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *Sasi*, 26(4), 557–570.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *Journal of Clinical Epidemiology*, 62(10), e1–e34.
- Modesti, P. A., Reboldi, G., Cappuccio, F. P., Agyemang, C., Remuzzi, G., Rapi, S., Perruolo, E., Parati, G., & Settings, E. S. H. W. G. on C. V. R. in L. R. (2016). Panethnic differences in blood pressure in Europe: a systematic review and meta-analysis. *PloS One*, 11(1), e0147601.
- Noor, Z. A., Sekarningrum, T. D., & Sulistyaningsih, T. (2021). Disparitas perkotaan-pedesaan: pemerataan

- dalam akses layanan kesehatan primer untuk lansia selama pandemi Covid-19. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(4), 576–585.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 1–11.
- Pahlevan-Sharif, S., Mura, P., & Wijesinghe, S. N. R. (2019). A systematic review of systematic reviews in tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 39, 158–165.
- Perceka, A. L. (2018). Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 165–169.
- Permana, R. S. M., & Mahameruaji, J. N. (2020). Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 17–33.
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108.
- Rachman, N. F. (2018). Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 1–23.
- Rahman, A., Satispi, E., & Adiyasha, D. L. (2020). PERBANDINGAN E-GOVERNMENT ANTARA SINGAPURA DAN JEPANG: PERSPEKTIF DETERMINAN DAN PERANNYA DALAM MENGEKTIFKAN PEMERINTAHAN DAN MENGENDALIKAN KORUPSI. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 177–199.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Sinaulan, R. L. (2018). Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 31.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88.
- Sunarsi, D. (2018). Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategik & Karakterisrik Sistem Pendukungnya: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & ....* <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/461>
- Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 33–51.
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA (Studi Normatif dan Perbandingannya). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 10(2), 171–192.
- Zempi, C. N., Maryam, S., & Priyono, P. (2022). E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan*

Humaniora, 6(1), 27–36.